

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Pustaka

##### Penelitian Sebelumnya

Pengadaan barang dan jasa pada suatu instansi atau perusahaan merupakan kegiatan rutin yang selalu dilakukan. Pengadaan barang dan jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang serta jasa yang diperlukan guna keberlangsungan operasional instansi atau perusahaan. H. Andri dkk (2010), melakukan penelitian ini sehingga diperlukan suatu model proses pengadaan yang lebih terbuka, transparan dan akuntabel yang akan menghasilkan *win-win solution* bagi semua pihak yang terlibat didalamnya.

*E-procurement* adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang memanfaatkan teknologi informasi. Teknologi informasi digunakan untuk melakukan pengolahan data pengadaan hingga ke proses pembuatan laporan. Model *E-Procurement* ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang muncul pada proses pengadaan barang dan jasa secara konvensional sehingga akan tercipta suatu proses pengadaan barang dan jasa yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui model *e-procurement*. H. Andri dkk (2010).

Tata kelola Teknologi Informasi (TI), (*IT Governance*) merupakan struktur hubungan dan proses untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi untuk mencapai tujuannya dengan menambahkan nilai ketika

menyeimbangkan resiko dibandingkan dengan TI dan prosesnya, (Utomo.,P.,A., 2011). Dalam merancang model proses bisnis pengujian saat ini melihat kinerja dan merakit kebijakan yang dapat mendukung peningkatan efisiensi dan efektifitas melalui penyelerasan tujuan bisnis dan tujuan TI untuk evaluasi kinerja sistem informasi melalui pendekatan sistim dinamik meningkatkan jumlah pengujian yang dapat diselesaikan tepat waktu, (Suhartono.,A.,A., 2011). Pengolahan sumberdaya teknologi informasi merupakan salah satu bagian dari Tata kelola TI dalam perusahaan, pengelolaan terhadap sumber daya TI bertujuan untuk memastikan sumberdaya TI dapat mendukung TI yang diimplementasikan secara optima, efektif dan efisien, (Marina.,P.,A.,dkk., 2012). Tata kelola COBIT (*Control Objective for Information and related Technology*) dapat digunakan dalam melakukan kegiatan monitoring implementasi TI pada perusahaan maupun pemerintah, (Prasetyo.,E., 2011).

Tabel 2. 1: Review Penelitian Terdahulu

No	Judul	Oleh	Thn/ ISBN	General Idea	Hasil Penelitian	Kelebihan	Kelemahan	Perbandingan
1	Permasalahan <i>e-Procurement</i> pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Solusinya: Dalam Perspektif Manajemen Operasional	Dedy Cahyadi	2009	Penerapan <i>e-Procurement</i> Pemprov Kaltim dapat diselesaikan dengan melakukan perubahan Tata kelola yang membawa pada konsekuensi perubahan pada kuantitas dan kualitas SDM, peningkatan anggaran dan pengetatan regulasi (perangkat hukum).	Melakukan perubahan Tata kelola yang membawa pada konsekuensi perubahan pada kuantitas dan kualitas SDM, peningkatan anggaran dan pengetatan regulasi (perangkat hukum). sangat diperlukan sebagai dasar	Solusi yang bisa di ambil adalah melakukan perubahan Tata kelola yang membawa pada konsekuensi perubahan pada kuantitas dan kualitas SDM, peningkatan anggaran dan pengetatan regulasi (perangkat hukum).	Belum ada regulasi di daerah yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan implementasi sistem <i>e-proc</i> , padahal payung hukum dalam Tata kelola pemerintahan dalam suatu kegiatan pemerintahan.	Obyek penelitian berbeda parameter perspektif berbeda
2	Rancangan Tata kelola TI Untuk Institusi Pemerintah Studi Kasus Bappenas	Risma Bayu Putra dan Dana Indra Sensuse	ISBN 1412-8896	Dengan meningkatnya peran teknologi informasi maka investasi di bidang teknologi informasi semakin besar dan semakin kompleks dalam pengelolaannya. Oleh	Dari keseluruhan model tersebut dapat dilihat seberapa jauh tingkat kematangan Tata kelola TI pada Bappenas yang kemudian akan ditentukan solusi untuk mencapainya.	Faktor-faktor yang menjadi pendukungnya adalah sudah mulai tumbuh rasa keinginan dari para pimpinan divisi lain setelah	Investasi TI berjalan kurang baik, selain itu keinginan masing-masing untuk mengembangkan TI-nya dirasakan menjadi suatu masalah ketika	Obyek penelitian berbeda parameter perspektif berbeda

				karena itu dibutuhkan suatu Tata kelola teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasinya		merasakan manfaat yang diberikan TI.	Pusdatinrenbang ingin mengintegrasikannya.	
3	<i>E-procurement</i> dalam pengadaan barang dan jasa Untuk mewujudkan akuntabilitas di kota yogyakarta	Kodar Udoyono	2012	Temuan dari tesis ini adalah Pertama, dimensi fisibilitas dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kota Yogyakarta tahun 2009 meliputi regulatif, teknokratis dan administratif, dan politik, dan kebutuhan masyarakat.	Dimensi fisibilitas harus memenuhi nilai kelayakan seperti adanya regulasi yang menjamin terlaksananya <i>E-Procurement</i> , adanya dukungan pelebagaan <i>EProcurement</i> , adanya dukungan dari <i>stakeholder</i> terhadap implementasi <i>E-Procurement</i> , dan adanya dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan <i>E-Proc</i>	kemauan politik (political will). Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik hanya dapat berkembang apabila ada komitmen yang kuat dari pimpinan daerah dalam mengawasi dan mendukung implementasi E-Procurement	Minimnya monitoring dalam implementasi tender dilapangan	Obyek penelitian berbeda parameter perspektif berbeda
4	Perencanaan Tata kelola Teknologi Informasi Berdasarkan Framework Cobit (Studi Kasus Pada Direktorat Metrologi)	Falahah	2006	Tujuan perencanaan Tata kelola ini adalah untuk menghasilkan rekomendasi Tata kelola pada proses TI yang paling penting pada instansi tersebut.	evaluasi kondisi yang berjalan, penentuan kondisi yang ingin dicapai, penentuan prioritas proses TI yang dianggap penting bagi keberhasilan pencapaian tujuan bisnis dan penentuan obyek kendali	Identifikasi status saat ini dapat menggunakan model kematangan ( <i>maturity model</i> ) dengan pendekatan	Berdasarkan pengamatan di lapangan, hingga saat ini Direktorat Metrologi belum memiliki sistem informasi yang menunjang tugas dan fungsi	Obyek penelitian berbeda parameter perspektif berbeda

					yang terkait dengan proses tersebut. Hasilnya berupa rekomendasi Tata kelola spesifik pada proses TI yang dianggap penting tersebut.	pragmatis dan terstruktur untuk mengukur seberapa baik organisasi mengembangkan proses dibandingkan dengan skala yang konsisten dan mudah dipahami	utamanya dalam bidang tera dan tera ulang.	
5	Pengembangan <i>E-Procurement</i> Dengan menggunakan Kerangka Kerja COBIT 4.1	Onorio Dos Santos	2013	Penelitian ini menjelaskan adanya metode baru untuk meningkatkan analisis dan pengembangan e-procurement di Kementerian Keuangan Timor - Leste dengan merancang <i>e-procurement</i> dengan Kerangka Kerja COBIT yang aman.	Tujuan penelitian ini adalah mengusulkan suatu metode baru untuk memperluas dan mengembangkan <i>e-procurement</i> yang masih manual ke elektronik dalam rangka kualitas layanan yang efektif dan efisien. Teknologi <i>e-procurement</i> ini menggunakan COBIT dari penelitian ini pemanfaatan <i>e-procurement</i> dapat memberikan transparansi dan efisiensi bagi Kementerian Keuangan Timor – Leste dan pihak yang akan mengikuti tender.	Metode baru untuk memperluas dan mengembangkan <i>e-procurement</i> masih manual ke elektronik dalam rangka kualitas layanan yang efektif dan efisien.	Kementerian Keuangan Timor - Leste telah menerapkan <i>e-procurement</i> , tetapi terdapat permasalahan berkaitan dengan proyek dengan nilai dibawah 1 Juta US Dollar dan sistem yang diterapkan disana masih manual.	

## **B. Landasan Teori**

Tata kelola Teknologi Informasi

Tata kelola TI memiliki peran yang penting dalam memberikan keunggulan dalam persaingan di dunia usaha. Pada awalnya, Tata kelola TI hanya berkembang di sektor swasta. Namun, semakin pesatnya perkembangan teknologi saat ini, maka sektor publik pun dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi pengguna jasanya. ITGI (*IT Governance Institute, 2007*) menyatakan bahwa Tata kelola IT mengintegrasikan dan menginstitusikan praktek yang baik untuk memastikan bahwa TI mendukung tujuan usaha. Tata kelola IT memungkinkan perusahaan untuk mengambil keuntungan penuh dari informasinya, sehingga memaksimalkan keuntungan, memanfaatkan peluang dan mendapatkan keuntungan kompetitif. Dengan adanya Tata kelola yang baik, diharapkan TI yang ada mampu memenuhi tujuan organisasi. TI juga dikelola oleh *good and best practice* yang memastikan bahwa informasi dan teknologi yang ada mendukung proses bisnisnya, sumber daya yang ada digunakan dengan tanggung jawab dan risiko yang telah dikendalikan dengan tepat. Tujuan dari Tata kelola TI adalah memastikan bahwa *performance* TI telah sesuai dengan keinginan dimana TI tersebut mampu memenuhi kebutuhan dan tujuan organisasi serta mendatangkan manfaat bagi organisasi tersebut. TI diharapkan mampu memanfaatkan peluang sebaik-baiknya dan mampu memaksimalkan manfaat, sumber daya TI harus digunakan dengan penuh tanggung jawab dan risiko TI yang ada harus dapat dikendalikan dengan baik.

## 2.1 COBIT (*Control Objectives for Information and Related Technology*)

### 2.1.1 Pengertian Cobit :

COBIT adalah sekumpulan dokumentasi *best practices* untuk *TI Governance* yang dapat membantu auditor, pengguna (*user*), dan manajemen, untuk menjembatani *gap* antara risiko bisnis, kebutuhan *control* dan masalah-masalah teknis TI.

### 1.1.2 Maksud dari Cobit

Maksud utama dari COBIT :

1. Menyediakan-kebijakan yang jelas dan praktik-pratik yang baik untuk IT governance dalam organisasi tingkatan dunia.
2. Membantu senior management memahami dan memanage resiko-resiko terkait dengan TI. COBIT melaksanakannya dengan menyediakan satu kerangka *IT governance* dan petunjuk *control objective* rinci untuk manajemen, pemilik *proses business* , *users*, dan *auditors*.

### 1.1.3 Tujuan Cobit

1. Diharapkan dapat membantu menemukan berbagai kebutuhan manajemen yang berkaitan dengan TI.
2. Agar dapat mengoptimalkan investasi TI Menyediakan ukuran atau kriteria ketika terjadi penyelewengan atau penyimpangan.

Adapun manfaat jika tujuan tersebut tercapai adalah :

1. Dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan.
2. Dapat mendukung pencapaian tujuan bisnis.
3. Dapat meminimalisasikan adanya tindak kecurangan/*fraud* yang merugikan perusahaan yang bersangkutan.

#### 1.1.4 Landasan Cobit

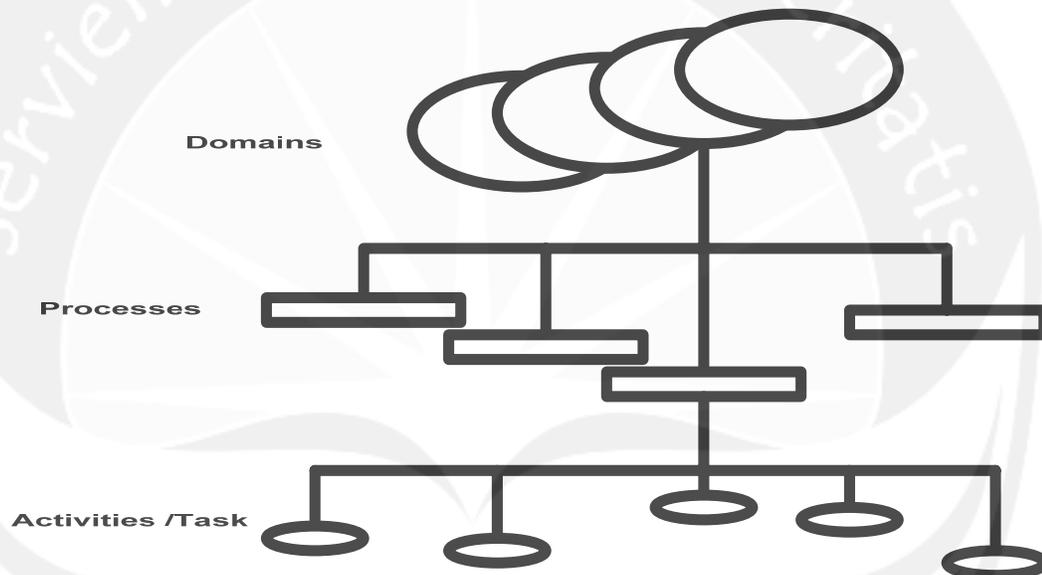
1. Menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran-sasaran,
2. Suatu organisasi harus mengelola sumber daya TI nya melalui satu kumpulan proses-proses yang dikelompokkan secara alami.
3. Grup-grup proses COBIT disusun secara sederhana dan berorientasi pada hirarki bisnis
4. Setiap proses merujuk sumberdaya TI, dan persyaratan-persyaratan kualitas, *fiduciary*/kepercayaan, dan keamanan dari informasi.

#### 1.1.5 Kerangka Kerja Cobit

Kerangka kerja COBIT, terdiri dari tujuan pengendalian tingkat tinggi dan struktur klasifikasi keseluruhan. Terdapat tiga tingkat (level) usaha pengaturan TI yang menyangkut manajemen sumberdaya TI. Mulai dari bawah, yaitu kegiatan dan tugas (*activities and tasks*) yang diperlukan untuk mencapai hasil yang dapat diukur. Dalam aktivitas terdapat konsep siklus hidup yang di dalamnya terdapat kebutuhan pengendalian khusus. Kemudian satu lapis di atasnya terdapat proses yang merupakan gabungan dari kegiatan dan tugas (*activities and tasks*) dengan

keuntungan atau perubahan (pengendalian) alami. Pada tingkat yang lebih tinggi, proses biasanya dikelompokkan bersama kedalam domain. Pengelompokan ini sering disebut sebagai tanggung jawab domain dalam struktur organisasi dan yang sejalan dengan siklus manajemen atau siklus hidup yang dapat diterapkan pada proses TI, (Supradono B,2011).

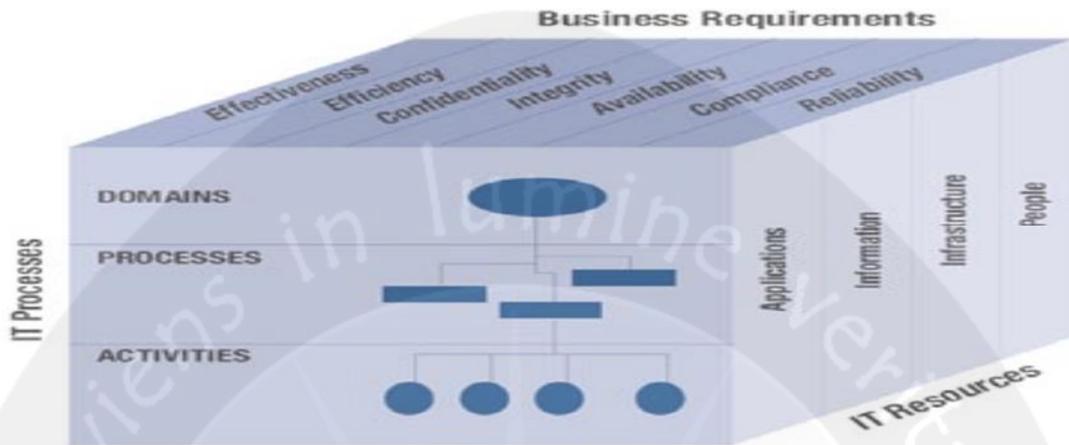
dapat dilihat pada gambar :



*Gambar 2. 1 : Tiga tingkat usaha pengaturan TI (Sumber: ITGI,2007)*

Selanjutnya, konsep kerangka kerja dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu (1) kriteria informasi. (2) sumber daya TI , dan (3) proses TI.

Ketiga sudut pandang tersebut digambarkan dalam kubus COBIT sebagai berikut :



Gambar 2. 2: Konsep Kerangka Kerja COBIT (IT Governance Institute, 2007)

### 1.1.6 Kegunaan COBIT

*Control Objectives of Information and Related Technology* (COBIT) merupakan suatu metodologi yang terdiri dari standar dan pengendalian yang dibuat untuk membantu organisasi dalam implementasi, review, administrasi, dan pemantauan lingkungan teknologi informasi. COBIT merupakan seperangkat alat bagi manajemen IT yang diciptakan oleh *Information System Audit and Control Association* (ISACA) dan *IT Governance Institute* (ITGI) pada tahun 1992, dengan misi untuk mengembangkan, melakukan riset, dan mempublikasikan suatu standar teknologi informasi yang diterima umum dan selalu *up to date* untuk digunakan dalam kegiatan bisnis sehari-hari.

COBIT edisi pertama diluncurkan oleh yayasan ISACF pada tahun 1996. COBIT edisi kedua, merefleksikan suatu peningkatan sejumlah dokumen sumber, revisi pada tingkat tinggi dan tujuan pengendalian rinci dan tambahan seperangkat alat

implementasi (*intplementation tool set*), yang telah dipublikasikan pada tahun 1998. COBIT pada edisi ketiga ditandai dengan masuknya penerbit utama baru COBIT yaitu IT Governance Institute (ITGI). ITGI dibentuk oleh ISACA dan yayasan terkait pada tahun 1998 dan memberikan pemahaman lebih dan mengadopsi prinsip-prinsip pengaturan TI Melalui penambahan pedoman manajemen (*management guidelines*) untuk COBIT edisi ketiga dikeluarkan pada tahun 2000. Dalam edisi ini terdapat penambahan yang meliputi pedoman bagi manajemen untuk menerapkan COBIT dan fokusnya diperluas dan ditingkatkan pada Tata kelola IT. COBIT edisi keempat merupakan versi terakhir dari tujuan pengendalian untuk informasi dan teknologi terkait.

COBIT adalah sekumpulan dokumentasi praktik baik untuk Tata kelola IT yang dapat membantu auditor, pengguna (*user*), dan manajemen, untuk menjembatani gap antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol dan masalah-masalah teknis TI. (Supradono B, 2011).

Dalam melakukan audit, diperlukan sebuah standar yang bisa membantu agar terjadi pengukuran yang valid dan *reliable*. Dalam penelitian ini, standar yang digunakan adalah COBIT. Standar COBIT dipilih karena kerangka kerja COBIT memberikan gambaran paling detil mengenai strategi dan kontrol dalam pengaturan proses teknologi informasi yang mendukung keselarasan strategi bisnis dan tujuan teknologi informasi (Sarno, 2009).

### 1.1.7 Model Kematangan (*Maturity Model*)

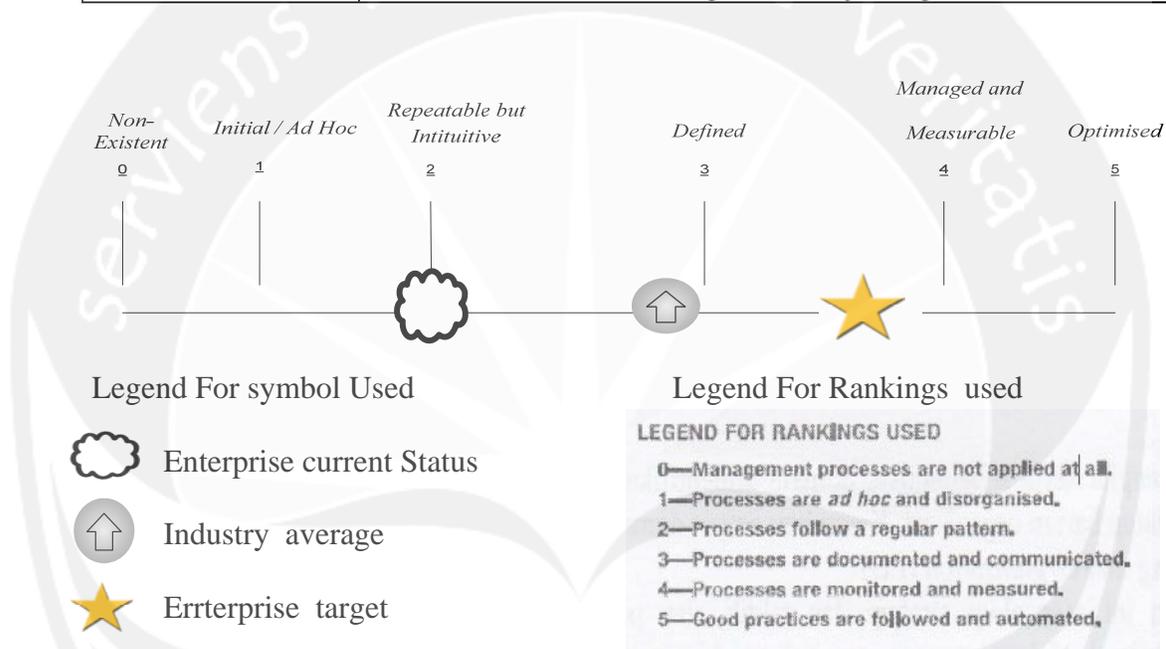
Maturity model merupakan alat ukur untuk mengetahui kondisi proses IT yang digunakan pada saat sekarang oleh suatu organisasi. Kemudian dapat digunakan untuk mengendalikan dan memonitor proses IT untuk meyakinkan pencapaian tujuan-tujuan kinerja proses IT. Dalam pembuatan Maturity model ini digunakan kuisioner yang dibuat berdasarkan COBIT untuk proses-proses yang terdapat pada *Control process* yang telah ditentukan sebelumnya. Responden akan memilih tingkat pengelolaan yang sangat sesuai dengan kondisi saat ini (Jusuf,2009). Maturity model terdiri dari pengembangan metode penilaian sehingga suatu organisasi dapat menilai dirinya dari keadaan *non-existent* sampai keadaan *optimized* (0-5). Untuk setiap proses IT, terdapat suatu skala ukuran bertahap, berdasarkan rating 0.*Non Existent*, 1. *Initial*, 2. *Repeatable*, 3. *Defined*, 4. *Managed*, dan 5. *Optimized*. Pendekatan ini diambil berdasarkan *maturity model software engineering institute*. Terhadap tingkatan dalam model ini dikembangkan untuk tiap 34 proses COBIT (Sasongko, 2009).

Model kematangan (*maturity model*) digunakan sebagai alat untuk melakukan *benchmarking* dan *self-assessment* oleh manajemen teknologi informasi secara lebih efisien. Model kematangan untuk pengelolaan dan kontrol pada proses teknologi informasi didasarkan pada metoda evaluasi perusahaan atau organisasi, sehingga dapat mengevaluasi sendiri, mulai dari level 0 (*non-existent*) hingga level 5 (*optimised*). Dapat dilihat pada tabel 1:

Tabel 2. 2: Generic maturity model (Sumber: IT GI 2007)

Level	Maturity Level
<i>0 Non-Existent</i>	Perusahaan tidak mengetahui sama sekali proses teknologi informasi di perusahaannya
<i>1 Initial / Ad Hoc</i>	Pada level ini, organisasi pada umumnya tidak menyediakan lingkungan yang stabil untuk mengembangkan suatu produk baru. Ketika suatu organisasi kelihatannya mengalami kekurangan pengalaman manajemen, keuntungan dari mengintegrasikan pengembangan produk tidak dapat ditentukan dengan perencanaan yang tidak efektif, respon sistem. Proses pengembangan tidak dapat diprediksi dan tidak stabil, karena proses secara teratur berubah atau dimodifikasi selama pengerjaan berjalan beberapa form dari satu proyek ke proyek lain. Kinerja tergantung pada kemampuan individual atau <i>term</i> dan varies dengan keahlian yang dimilikinya.
<i>2 Repeatable but Intuitive</i>	Pada level ini, kebijakan untuk mengatur pengembangan suatu proyek dan prosedur dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut ditetapkan. Tingkat efektif suatu proses manajemen dalam mengembangkan proyek adalah <i>institutionalized</i> , dengan memungkinkan organisasi untuk mengulangi pengalaman yang berhasil dalam mengembangkan proyek sebelumnya, walaupun terdapat proses tertentu yang tidak sama. Tingkat efektif suatu proses mempunyai karakteristik seperti; <i>practiced</i> , dokumentasi, <i>enforced</i> , <i>trained</i> , <i>measured</i> , dan dapat ditingkatkan. <i>Product requirement</i> dan dokumentasi perancangan selalu dijaga agar dapat mencegah perubahan yang tidak diinginkan.
<i>3 Defined</i>	Pada level ini, proses standar dalam pengembangan suatu produk baru didokumentasikan, proses ini didasari pada proses pengembangan produk yang telah diintegrasikan. Proses-proses ini digunakan untuk membantu manejer, ketua tim dan anggota tim pengembangan sehingga bekerja dengan lebih efektif. Suatu proses yang telah didefinisikan dengan baik mempunyai karakteristik; <i>readiness criteria</i> , <i>inputs</i> , standar dan prosedur dalam mengerjakan suatu proyek, mekanisme verifikasi, output dan kriteria selesainya suatu proyek. Aturan dan tanggung jawab yang didefinisikan jelas dan dimengerti. Karena proses perangkat lunak didefinisikan dengan jelas, maka manajemen mempunyai pengetahuan yang baik mengenai kemajuan proyek tersebut. Biaya, jadwal dan kebutuhan proyek dalam pengawasan dan kualitas produk yang diawasi.
<i>4 Managed and Measurable</i>	Pada level ini, organisasi membuat suatu matrik untuk suatu produk, proses dan pengukuran hasil. Proyek mempunyai kontrol terhadap produk dan proses untuk mengurangi variasi kinerja proses sehingga terdapat batasan yang dapat diterima. Resiko perpindahan teknologi produk, proses manufaktur, dan pasar harus diketahui dan diatur secara

	hati-hati. Proses pengembangan dapat ditentukan karena proses diukur dan dijalankan dengan limit yang dapat diukur.
<i>5 Optimised</i>	Pada level ini, seluruh organisasi difokuskan pada proses peningkatan secara terus-menerus. Teknologi informasi sudah digunakan terintegrasi untuk otomatisasi proses kerja dalam perusahaan, meningkatkan kualitas, efektifitas, serta kemampuan beradaptasi perusahaan. Tim pengembangan produk menganalisis kesalahan dan <i>defects</i> untuk menentukan penyebab kesalahannya. Proses pengembangan melakukan evaluasi untuk mencegah kesalahan yang telah diketahui dan defects agar tidak terjadi lagi. .



Gambar 2. 3: Grafik maturity Model ( Sumber:IT Governance Institute, 2007)

### 1.1.8 E-Procurement

*E-Procurement* merupakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik terutama berbasis web atau internet. Instrumen ini memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi meliputi pevelangan umum secara elektronik. Pengadaan barang dan jasa tanpa *E-Procurement* telah mengakibatkan penyalahgunaan anggaran negara. *E-Procurement* ini adalah bagaimana proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan dan bagaimana

caranya memanfaatkan teknologi informasi agar tidak banyak membuang buang waktu dan biaya (Indrajit dkk, 2002).

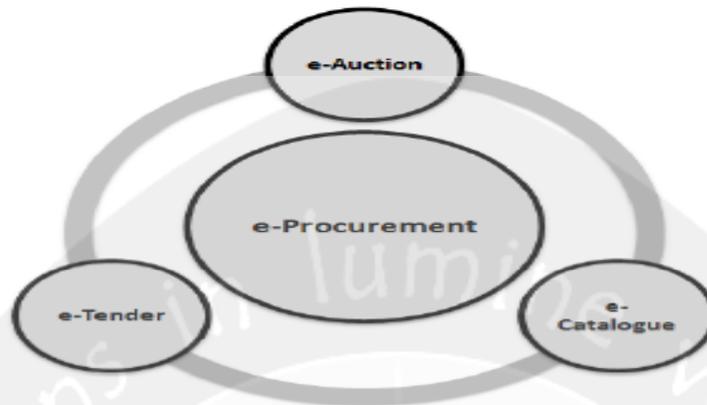
*E-Procurement* dapat menjadi instrumen untuk mengurangi tindakan KKN karena melalui *E-Procurement* lelang menjadi terbuka sehingga akan muncul tawaran-tawaran yang lebih rasional. Bahkan mereka juga yang tidak berada dalam jaringan pun bisa terlibat. Meskipun tidak terhindari adanya ‘permainan-permainan’ pula dalam praktik *E-Procurement*. Penggunaan *E-Procurement* secara rasional dapat menghemat anggaran 20-40%. Selain itu, ada sisi negatif yang bisa ditimbulkan dalam pengadaan barang dan jasa yang sering terjadi tanpa *E-Procurement* antara lain: Pertama, tender arisan dan adanya *kickback* pada proses tender; Kedua, suap untuk memenangkan tender; Ketiga, proses tender tidak transparan Keempat, *supplier* bermain mematok harga tertinggi (*mark up*); Kelima, memenangkan perusahaan saudara, kerabat atau orang-orang partai tertentu; Keenam, pencantuman spesifikasi teknik hanya dapat dipasok oleh satu pelaku usaha tertentu; Ketujuh, adanya almamater sentris; Kedelapan, pengusaha yang tidak memiliki administrasi lengkap dapat ikut tender bahkan menang; Kesembilan, tender tidak diumumkan; Kesepuluh, tidak membuka akses bagi peserta dari daerah (Suchahyo dkk, 2009).

Menurut Kantor Manajemen Informasi Pemerintah Australia (*Australian Government Information Management, AGIMO*) : *e-procurement* merupakan pembelian antar-bisnis (*business-to-business, B2B*) dan penjualan barang dan jasa melalui internet.

### 1.1.9 Fitur-Fitur E-Procurement

Pembelian dan penjualan online mengefisienkan proses pengadaan dan mengurangi biaya operasi dengan mengurangi pengeluaran untuk waktu administrasi dan memperpendek birokrasi. Penerapan *e-procurement* mendorong upaya transaksi dari pusat pembuat pesanan hingga titik kebutuhan pada pengguna desktop bisnis. Hal ini memastikan kesesuaian terhadap perjanjian dengan pemasok yang dipilih melalui katalog *online* yang mana dilihat-lihat oleh para pengguna untuk menemukan item yang dibutuhkan. Fitur utama *e-procurement* meliputi :

- a. Katalog elektronik untuk item-item standar/inti.
- b. Kemampuan *punch-out* ke situs-situs web pemasok untuk produk-produk yang dinamis/bermacam-macam.
- c. Memunculkan kembali daftar-daftar permintaan/belanja untuk item-item yang dibeli secara teratur.
- d. Jalur-jalur persetujuan yang menyatu (*built-in*) untuk menjalankan kendali anggaran belanja.
- e. Kemampuan untuk memberi laporan



Gambar 2. 4: Fitur E-Procurement (sumber: Heryandi,A)

#### 1.1.10 Tujuan dan Manfaat E-Procurement

1. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah
2. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
3. memudahkan *sourcing* dalam memperoleh data dan informasi tentang barang/jasa dan penyedia barang/jasa
4. menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah berjalan lebih cepat dan akurat
5. menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak yang sama bagi para pihak pelaku pengadaan barang/jasa
6. menciptakan situasi yang kondusif agar terjadi persaingan yang sehat antar penyedia barang/jasa
7. menciptakan situasi yang kondusif bagi aparatur pemerintah dan menjamin terselenggaranya komunikasi *online* untuk mengurangi intensitas pertemuan langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

Sedangkan manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari pelaksanaan *E-Procurement* adalah sebagai berikut :

- a. Meminimalisasi faktor kesalah pahaman yang terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa
- b. Meminimalisasi kecurigaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa
- c. Membantu proses pengendalian administrasi projek terutama pada proses pengadaan barang/jasa
- d. Memudahkan bagi peserta lelang untuk mengikuti semua tahapan lelang sesuai regulasi yang ada dengan pemanfaatan teknologi informasi (*internet*)
- e. Memberi keadilan bagi seluruh peserta lelang baik peserta dari penyedia barang/jasa dengan kualifikasi kecil atau *non* kecil.